



## Milan Urban Food Policy Pact

15 Oktober 2015

**Mengakui bahwa kota-kota yang menampung lebih dari setengah populasi dunia mempunyai peran strategis** dalam mengembangkan sistem pangan berkelanjutan dan mempromosikan pola makan sehat, dan oleh karena setiap kota berbeda, kota-kota tersebut merupakan pusat inovasi ekonomi, politik dan budaya, serta mengelola sumber daya, infrastruktur, investasi dan keahlian dari masyarakat luas;

**Mengingat bahwa sistem pangan saat ini sedang mengalami tantangan** untuk menyediakan akses terhadap pangan yang permanen dan dapat diandalkan, memadai, aman, lokal, beragam, merata, sehat dan kaya nutrisi untuk semua; dan bahwa tugas menyediakan pangan bagi kota-kota akan menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh, antara lain, distribusi dan akses yang tidak seimbang, degradasi lingkungan, kelangkaan sumber daya dan perubahan iklim, pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan, serta bahan makanan yang terbuang dan limbah pangan;

**Mengakui bahwa percepatan urbanisasi sangat berdampak pada dunia kita** – dalam dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup – yang oleh karena itu memerlukan kajian ulang terhadap cara kota menyediakan makanan dan air serta barang dan jasa penting lainnya;

**Mengakui bahwa kelaparan dan kekurangan gizi dalam berbagai bentuknya terjadi** di semua kota, yang menimbulkan beban besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan individu sehingga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang besar pada tingkat rumah tangga, komunitas, kota dan nasional;

**Mengetahui bahwa keluarga petani dan produsen pangan skala kecil**, (terutama produsen pangan perempuan di banyak negara) memainkan peranan penting dalam menyediakan pangan bagi kota-kota dan wilayah mereka, dengan membantu mempertahankan sistem pangan yang berketahanan, adil, dan sesuai dengan budaya; dan bahwa reorientasi sistem pangan dan rantai nilai menuju pola makan berkelanjutan merupakan cara untuk menghubungkan kembali konsumen dengan produsen di pedesaan dan perkotaan;

**Mengakui bahwa pertanian perkotaan dan pinggiran kota menawarkan peluang** untuk melindungi dan mengintegrasikan keanekaragaman hayati ke dalam lanskap wilayah kota dan sistem pangan, sehingga berkontribusi terhadap sinergi dalam ketahanan pangan dan gizi, jasa ekosistem, dan kesejahteraan manusia;

**Menyadari bahwa karena kebijakan pangan berkaitan erat dengan banyak tantangan dan kebijakan perkotaan lainnya**, seperti kemiskinan, kesehatan dan perlindungan sosial, kebersihan dan sanitasi, perencanaan penggunaan lahan, transportasi dan perdagangan, energi, pendidikan, dan kesiapsiagaan bencana, maka sangatlah penting untuk mengadopsi pendekatan yang komprehensif, interdisipliner dan antarlembaga;

**Mengakui bahwa masyarakat sipil dan sektor swasta mempunyai peran besar** dalam memenuhi kebutuhan pangan kota, memberikan pengalaman, inovasi dan kampanye-kampanye untuk sistem pangan yang lebih berkelanjutan dan mengarusutamakan kebutuhan penting akan pendekatan yang inklusif secara sosial dan berbasis hak dalam kebijakan pangan perkotaan;

**Mengingat** bahwa kota-kota telah membuat komitmen untuk mengatasi perubahan iklim; untuk mempromosikan strategi dan tindakan untuk memitigasi emisi Gas Rumah Kaca dan mengadaptasi kota dari dampak perubahan iklim terhadap sistem pangan perkotaan (misalnya dalam Forum Perkotaan Dunia dan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Habitat III mengenai Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan yang akan datang); dan untuk mendorong pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan melalui inisiatif keanekaragaman hayati kota sebagai bagian dari Konvensi Keanekaragaman Hayati;

**Mengakui** bahwa kota-kota dan wilayah sekitarnya akan aktif dalam mengoperasionalkan proses-proses internasional seperti Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan target-target dalam Agenda Pembangunan pasca-2015; bahwa mereka akan terlibat dalam perundingan yang akan datang untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (COP21), serta berkontribusi kepada Tantangan Nol Kelaparan, membahas pola makan perkotaan yang berkelanjutan dalam Konferensi Internasional Kedua tentang Gizi, dan memainkan peran penting dalam Kerangka Pengurangan Risiko Bencana pasca-2015;

**Pada pertemuan** di Milano dalam rangka Milan Expo *Feeding the Planet, Energy for Life* dengan ini kami menyatakan:

**DENGAN MENANDATANGANI PAKTA KEBIJAKAN PANGAN  
PERKOTAAN MILAN,  
KAMI, WALIKOTA DAN PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH,  
BERKOMITMEN SEBAGAI BERIKUT:**

1. Kami akan berupaya mengembangkan sistem pangan berkelanjutan yang inklusif, berketahanan, aman dan beragam, yang menyediakan pangan sehat dan terjangkau bagi semua orang dalam kerangka kerja berbasis hak asasi manusia, yang meminimalkan limbah dan melestarikan keanekaragaman hayati serta beradaptasi dan memitigasi dampak dari perubahan iklim;
2. Kami akan mendorong koordinasi antar departemen dan lintas sektor di tingkat kota dan masyarakat, berupaya mengintegrasikan pertimbangan kebijakan pangan perkotaan ke dalam kebijakan, program dan inisiatif sosial, ekonomi dan lingkungan, seperti, antara lain, pasokan dan distribusi pangan, perlindungan sosial, nutrisi, pemerataan, produksi pangan, pendidikan, keamanan pangan dan pengurangan limbah;
3. Kami akan mengupayakan koherensi antara kebijakan dan program kota terkait pangan dan dengan kebijakan dan proses subnasional, nasional, regional, dan internasional yang relevan;
4. Kami akan melibatkan semua sektor dalam sistem pangan (termasuk otoritas di negara sekitar, organisasi teknis dan akademis, masyarakat sipil, produsen skala kecil, dan sektor swasta) dalam perumusan, implementasi dan penilaian semua kebijakan, program dan inisiatif terkait pangan
5. Kami akan meninjau dan mengubah kebijakan, rencana dan peraturan perkotaan yang ada untuk mendorong pembentukan sistem pangan yang adil, berketahanan dan berkelanjutan;
6. Kami akan menggunakan Kerangka Aksi sebagai titik awal bagi setiap kota yang bertujuan untuk pengembangan sistem pangan perkotaan bagi kota tersebut dan kami akan membagikan perkembangannya dengan kota-kota yang berpartisipasi dan pemerintah nasional serta lembaga internasional bila diperlukan;
7. Kami akan mendorong kota-kota lain untuk bergabung dalam aksi kebijakan pangan kami.

**Ditandatangani oleh :**

(Nama perwakilan resmi kota atau pemerintah daerah)

Mewakili (Kota \_\_\_\_\_)

Date:

## Kerangka Aksi Kebijakan Pangan Perkotaan

Kerangka Aksi ini bersifat **sukarela**. Tujuannya adalah untuk menyediakan pilihan-pilihan strategis bagi kota-kota yang ingin **mencapai sistem pangan yang lebih berkelanjutan** dengan mengadopsi Pakta Kebijakan Pangan Perkotaan Milan yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Milan pada kegiatan Expo 2015 “*Feeding the Planet, Energy for Life*”.

Kerangka ini dibangun berdasarkan pengalaman langsung dari kota-kota yang berpartisipasi dan mempertimbangkan beragam komitmen, tujuan dan target yang relevan. Meskipun pilihan-pilihan tersebut telah disusun dalam kelompok-kelompok tematik, pilihan-pilihan tersebut harus dilihat sebagai pintu masuk menuju pencapaian tujuan bersama yaitu sistem pangan yang berkelanjutan. Sebagian besar intervensi (seperti makanan di sekolah atau kebun masyarakat) mungkin berada di bawah yurisdiksi lebih dari satu lembaga atau departemen kota. Sebagian besar intervensi akan berdampak pada berbagai dimensi (ekonomi, sosial, kesehatan dan lingkungan) pada pembangunan berkelanjutan.

Kota-kota dapat memilih, mengadaptasi dan mengelompokkan pilihan-pilihan ke dalam pedoman yang diperlukan agar sesuai dengan situasi khusus mereka. Tautan ke materi informasi terkait dan contoh praktik terbaik tersedia sebagai kumpulan materi panduan pelengkap.

### *Tindakan yang direkomendasikan: memastikan lingkungan yang mendukung tindakan yang efektif (tata kelola)*

1. **Memfasilitasi kolaborasi antar lembaga dan departemen kota** dan mengupayakan penyelarasan kebijakan dan program-program yang berdampak pada sistem pangan di berbagai sektor dan tingkat administratif, dengan mengadopsi dan mengarusutamakan pendekatan berbasis hak; Pilihan-pilihan dapat mencakup dedikasi staf tetap kota, peninjauan tugas dan prosedur, serta realokasi sumber daya.
2. **Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan** di tingkat kota melalui dialog politik, dan jika perlu, penunjukan penasihat kebijakan pangan dan/atau pengembangan wadah bagi multi-pemangku kepentingan atau dewan pangan, serta melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran.
3. **Mengidentifikasi, memetakan dan mengevaluasi inisiatif lokal** dan gerakan pangan masyarakat sipil untuk mengubah praktik terbaik menjadi program-program dan kebijakan-kebijakan yang relevan, dengan dukungan lembaga penelitian atau akademis lokal.
4. **Mengembangkan atau merevisi kebijakan dan rencana pangan perkotaan** dan memastikan alokasi sumber daya yang tepat dalam pemerintahan kota sehubungan dengan kebijakan-kebijakan dan program-program terkait pangan; meninjau, menyelaraskan dan memperkuat peraturan-peraturan kota; membangun kapasitas strategis untuk sistem pangan yang lebih berkelanjutan, sehat dan merata dengan menyeimbangkan kepentingan perkotaan dan pedesaan.
5. **Mengembangkan atau meningkatkan sistem informasi multisektoral** untuk pengembangan kebijakan dan akuntabilitas dengan meningkatkan ketersediaan, kualitas, kuantitas, cakupan dan pengelolaan serta pertukaran data terkait sistem pangan perkotaan, termasuk pengumpulan data formal maupun data yang dihasilkan oleh masyarakat sipil dan mitra lainnya.
6. **Mengembangkan strategi pengurangan risiko bencana** untuk meningkatkan ketahanan sistem pangan perkotaan, termasuk kota-kota yang paling terkena dampak perubahan iklim, krisis yang berkepanjangan dan kerawanan pangan kronis di wilayah perkotaan dan pedesaan.

### *Tindakan yang disarankan: pola makan dan nutrisi berkelanjutan*

7. **Mempromosikan pola makan yang berkelanjutan** (sehat, aman, sesuai budaya, ramah lingkungan dan berbasis hak) melalui program pendidikan, memajukan kesehatan dan program-program komunikasi yang relevan, dengan perhatian khusus pada sekolah, pusat perawatan, pasar dan media.
8. **Mengatasi penyakit tidak menular yang berhubungan dengan pola makan yang buruk dan obesitas**, memberikan perhatian khusus jika diperlukan untuk mengurangi asupan gula, garam, lemak trans, daging dan produk susu serta meningkatkan konsumsi buah-buahan dan sayuran serta makanan non-olahan.

9. **Mengembangkan pedoman pola makan berkelanjutan** untuk memberikan informasi kepada konsumen, perencana kota (khususnya untuk pengadaan pangan publik), penyedia layanan makanan, pengecer, produsen dan pengolah, dan mempromosikan kampanye komunikasi dan pelatihan.
10. **Menyesuaikan standar dan peraturan agar pola makan berkelanjutan dan air minum yang aman dapat diakses** di fasilitas sektor publik seperti rumah sakit, fasilitas kesehatan dan penitipan anak, tempat kerja, universitas, sekolah, layanan makanan dan katering, kantor kota dan penjara, dan sebisa mungkin, di sektor swasta. sektor distribusi dan pasar pangan eceran dan grosir.
11. **Mengeksplorasi instrumen peraturan dan sukarela** untuk mempromosikan pola makan berkelanjutan yang melibatkan perusahaan swasta dan publik, menggunakan kebijakan pemasaran, publisitas dan pelabelan; dan insentif atau disinsentif ekonomi; mengefektifkan peraturan mengenai pemasaran makanan dan minuman non-alkohol kepada anak-anak sesuai dengan rekomendasi WHO.
12. **Mendorong aksi bersama sektor kesehatan dan pangan** untuk menerapkan strategi terpadu yang berpusat pada masyarakat untuk gaya hidup sehat dan inklusi sosial.
13. **Berinvestasi dan berkomitmen untuk mencapai akses universal terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang memadai** dengan partisipasi masyarakat sipil dan berbagai kemitraan, jika diperlukan.

#### ***Tindakan yang direkomendasikan: keadilan sosial dan ekonomi***

14. **Memanfaatkan bantuan tunai dan makanan**, serta bentuk sistem perlindungan sosial lainnya (bank makanan, dapur pangan masyarakat, dapur umum darurat, dll.) untuk memberikan akses terhadap makanan sehat kepada masyarakat rentan, dengan tetap mempertimbangkan kepercayaan, budaya, tradisi, kebiasaan makan tertentu dan preferensi masyarakat yang beragam, demi menjaga martabat manusia dan untuk menghindari marginalisasi lebih lanjut.
15. **Mengarahkan kembali program penyediaan makanan di sekolah** dan lembaga layanan makanan lainnya agar menyediakan makanan yang sehat, bersumber secara lokal dan regional, musiman dan diproduksi secara berkelanjutan.
16. **Memajukan lapangan kerja yang layak bagi semua orang**, termasuk hubungan ekonomi yang adil, upah yang adil dan memperbaiki kondisi tenaga kerja di sektor pangan dan pertanian, dengan melibatkan perempuan sepenuhnya.
17. **Mendorong dan mendukung kegiatan ekonomi sosial dan solidaritas**, memberikan perhatian khusus pada kegiatan terkait pangan yang mendukung kehidupan yang berkelanjutan bagi populasi marginal di berbagai tingkat rantai makanan dan memfasilitasi akses terhadap makanan yang aman dan sehat baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
18. **Mempromosikan jaringan dan mendukung kegiatan akar rumput** (seperti kebun masyarakat, dapur pangan masyarakat, dapur umum, dll.) yang menciptakan inklusi sosial dan menyediakan makanan bagi individu yang terpinggirkan.
19. **Mendorong pendidikan partisipatif, pelatihan dan penelitian** sebagai elemen kunci dalam memperkuat aksi lokal untuk meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi, mendorong pendekatan berbasis hak, mengentaskan kemiskinan dan memfasilitasi akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi.

#### ***Tindakan yang direkomendasikan : produksi pangan***

20. **Mempromosikan dan memperkuat produksi dan pengolahan pangan perkotaan dan pinggiran kota** berdasarkan pendekatan berkelanjutan dan mengintegrasikan pertanian perkotaan dan pinggiran kota ke dalam rencana ketahanan kota.
21. **Mengupayakan koherensi produksi, pengolahan dan distribusi pangan antara perkotaan dan pedesaan di sekitarnya**, dengan fokus pada produsen skala kecil dan keluarga petani, dengan memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan dan generasi muda.

22. **Menerapkan pendekatan ekosistem untuk memandu perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan yang holistik dan terpadu**, berkolaborasi baik dengan otoritas perkotaan dan pedesaan serta pengelola sumber daya alam lainnya dengan menggabungkan fitur-fitur lanskap, misalnya dengan strategi minimalisasi risiko untuk meningkatkan peluang produksi agroekologi, konservasi lahan, dan keanekaragaman hayati dan lahan pertanian, adaptasi terhadap perubahan iklim, pariwisata, rekreasi dan jasa ekosistem lainnya.
23. **Melindungi dan menyediakan akses dan kepemilikan yang aman terhadap lahan** untuk produksi pangan berkelanjutan di wilayah perkotaan dan pinggiran kota, termasuk lahan untuk komunitas petani dan produsen kecil, misalnya melalui bank tanah atau perwalian lahan komunitas; menyediakan akses terhadap lahan kota untuk produksi pertanian lokal dan mendorong integrasi dengan penggunaan lahan serta rencana dan program pembangunan kota.
24. **Membantu memberikan layanan kepada produsen pangan di dalam dan sekitar kota**, termasuk pelatihan teknis dan bantuan keuangan (kredit, teknologi, keamanan pangan, akses pasar, dll.) untuk membangun sistem pangan multigenerasi dan layak secara ekonomi dengan masukan seperti kompos dari sisa makanan, *grey water* dari sisa penggunaan konsumen, dan energi dari limbah, dll. Serta memastikan bahwa hal-hal tersebut tidak bersaing dengan konsumsi manusia.
25. **Mendukung rantai pangan yang pendek**, organisasi-organisasi produsen, jaringan dan wadah produsen-ke-konsumen, dan sistem pasar lainnya yang mengintegrasikan infrastruktur sosial dan ekonomi sistem pangan perkotaan yang menghubungkan wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal ini dapat mencakup inisiatif ekonomi sosial dan solidaritas yang dipimpin oleh masyarakat sipil dan sistem pasar alternatif.
26. **Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan kembali air (limbah)** dalam pertanian dan produksi pangan melalui kebijakan dan program yang menggunakan pendekatan partisipatif.

#### ***Tindakan yang direkomendasikan: penyediaan dan distribusi pangan***

27. **Menilai aliran makanan ke dan melalui kota-kota** untuk memastikan akses fisik terhadap makanan segar dan terjangkau di lingkungan berpenghasilan rendah atau kurang terlayani sekaligus menangani perencanaan transportasi dan logistik yang berkelanjutan untuk mengurangi emisi karbon dengan bahan bakar atau sarana transportasi alternatif.
28. **Mendukung peningkatan teknologi dan infrastruktur penyimpanan, pengolahan, transportasi dan distribusi pangan** yang menghubungkan daerah pinggiran kota dan daerah pedesaan sekitarnya untuk memastikan konsumsi pangan musiman dan mengurangi kerawanan pangan serta terbuangnya bahan pangan dan hilangnya nutrisi dengan penekanan pada diversifikasi usaha pangan skala kecil dan menengah sepanjang rantai nilai yang dapat menyediakan lapangan kerja yang layak dan stabil.
29. **Menilai, meninjau dan/atau memperkuat sistem pengendalian pangan** dengan menerapkan undang-undang dan peraturan keamanan pangan setempat yang (1) memastikan bahwa produsen dan pemasok pangan di seluruh rantai pangan beroperasi secara bertanggung jawab; (2) menghilangkan hambatan akses penjualan bagi keluarga petani dan produsen kecil; Dan (3) mengintegrasikan dimensi keamanan pangan, kesehatan dan lingkungan.
30. **Meninjau kebijakan pengadaan publik dan perdagangan** yang bertujuan untuk memfasilitasi pasokan pangan dari rantai pendek yang menghubungkan kota-kota untuk menjamin pasokan makanan sehat, sekaligus memfasilitasi akses pekerjaan, kondisi produksi yang adil dan produksi berkelanjutan bagi produsen dan konsumen yang paling rentan, dengan demikian memanfaatkan potensi pengadaan publik untuk membantu mewujudkan hak atas pangan bagi semua.
31. **Memberikan dukungan kebijakan dan program untuk pasar masyarakat kota** termasuk pasar petani, pasar informal, pasar eceran dan grosir, restoran, dan distributor makanan lainnya, dengan mengakui pendekatan berbeda yang dilakukan kota dalam bekerja sama dengan komponen sistem pasar swasta dan publik.
32. **Meningkatkan dan memperluas dukungan terhadap infrastruktur** yang terkait dengan sistem pasar yang menghubungkan pembeli perkotaan dengan penjual perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan,

sekaligus membangun keterikatan dan kepercayaan sosial, mendukung pertukaran budaya, dan memastikan kehidupan yang berkelanjutan, terutama bagi perempuan dan wirausaha muda.

33. **Mengakui kontribusi sektor informal** terhadap sistem pangan perkotaan (dalam hal pasokan pangan, penciptaan lapangan kerja, memajukan pola makan lokal dan pengelolaan lingkungan) dan memberikan dukungan dan pelatihan yang sesuai di berbagai bidang seperti keamanan pangan, pola makan berkelanjutan, pencegahan dan pengelolaan sampah.

*Tindakan yang disarankan: sampah sisa makanan*

34. **Menghimpun para pelaku sistem pangan untuk menilai dan memantau penurunan sampah bahan pangan dan sisa makanan** di semua tahap rantai pasokan pangan wilayah kota, (termasuk produksi, pemrosesan, pengemasan, penyiapan makanan yang aman, penyajian dan penanganan, penggunaan kembali dan daur ulang) dan memastikan perencanaan dan desain yang holistik, transparansi, akuntabilitas dan integrasi kebijakan.
35. **Meningkatkan kesadaran akan bahan pangan yang terbuang dan sampah makanan** melalui acara dan kampanye yang ditargetkan; mengidentifikasi titik fokus seperti lembaga pendidikan, pasar komunitas, toko perusahaan, dan inisiatif solidaritas atau ekonomi sirkular lainnya.
36. **Berkolaborasi dengan sektor swasta serta penelitian, pendidikan, dan organisasi berbasis masyarakat** untuk mengembangkan dan meninjau, jika diperlukan, kebijakan dan peraturan kota (misalnya proses, standar kosmetik dan penilaian, tanggal kedaluwarsa, dll.) untuk mencegah pemborosan atau secara aman melakukan pembaruan makanan dan pengemasan makanan dengan menggunakan hierarki “memanfaatkan makanan bukan membuang”.
37. **Menghemat pangan dengan memfasilitasi pembaruan dan pendistribusian kembali konsumsi pangan yang aman dan bergizi bagi manusia**, jika memungkinkan, yang berisiko hilang, dibuang atau terbuang dari produksi, manufaktur, eceran, katering, grosir dan perhotelan.